



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dewas dan Direksi LPP RRI
Hari, Tanggal	: Rabu, 26 Januari 2022
Pukul	: 14.37 WIB – 15.40 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Lantai 1.
Ketua Rapat	: Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sartomo, S.S., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Acara	: Pembahasan DIPA LPP RRI Tahun Anggaran 2022
Hadir	: PIMPINAN: <ol style="list-style-type: none">1. Meutya Viada Hafid (F-PG)2. Drs. Utut Adianto (F-PDI Perjuangan)3. H. Bambang Kristiono, S.E. (F-Gerindra)4. H. Anton Sukartono Suratto, M.Si. (F-PD)5. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)

6. Puan Maharani
7. Dede Indra Permana, S.H.
8. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., MCOMN&MEDIAS
9. Junico BP Siahaan, S.E.
10. Dr. Effendi MS Simbolon, MIPol.
11. Ir. Rudianto Tjen
12. Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si.
13. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.
14. Drs. Mukhlis Basri
15. Itet Tridjajati Sumarjanto

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

16. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.,
17. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
18. I. Lodewijk F. Paulus
19. Nurul Arifin, M.Si.
20. Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.H., S.E., MAF., M.H.
21. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.

22. H. Alex Noerdin

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

- 23. Sugiono
- 24. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si.
- 25. Dr. H. Fadli Zon, SS., M.Sc.
- 26. Rachel Maryam Sayidina
- 27. Fadhlullah, S.E.
- 28. R. Imron Amin, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

- 29. Prananda Surya Paloh
- 30. Muhammad Farhan
- 31. Kresna Dewanata Phrosakh
- 32. Hasbi Anshory, S.E., M.M.
- 33. Hillary Brigitta Lasut, S.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

- 34. Drs. H. Taufiq R. Abdullah
- 35. Dr. (H.C.) H. A Muhaimin Iskandar, M.Si.
- 36. Drs. H. M. Syaiful Bahri Anshori, MP.
- 37. A. Helmy Faishal Zaini

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

- 38. Rizki Aulia Rahman Natakusumah
- 39. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A.
- 40. H. Darizal Basir, S.Sos., M.B.A.
- 41. Teuku Riefky Harsya

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

- 42. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
- 43. H. Sukamta, Ph. D.
- 44. H. Ahmad Syaikhu
- 45. Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

- 46. Ir. Alimin Abdullah
- 47. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Sc.
- 48. Hj. Farah Puteri Nahlia, M.Sc.
- 49. Slamet Ariyadi, S.Psi.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

- 50. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.
- 51. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.

Anggota yang Izin : 1. Mayjen TNI Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.
2. H. Bachrudin Nasori, S.Si., M.M.

- Undangan
- : 1. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo.
 2. Direktur Keuangan LPP RRI, Muhammad Fauzan.
 3. Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam.
 4. Direktur Teknologi dan Media Baru LPP RRI, Muhamad Sujai.
 5. Anggota Dewas LPP RRI, M. Kusnaeni.
 6. Anggota Dewas LPP RRI, M. Rohanudin.
 7. Anggota Dewas LPP RRI, Enderiman Butar-Butar.
 8. Anggota Dewas LPP RRI, Rini Purwandari.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Dewas Pengawas LPP RRI, Pak Ketuanya nggak ada?

Saya ucapkan “Selamat Datang” juga kepada Dirut LPP RRI, Saudara Hendrasmo beserta seluruh jajarannya,

Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI pada rapat hari ini Rabu, 26 Januari 2022.

Rapat hari ini sudah diikuti oleh, dihadiri, ditandatangani oleh 13 anggota dari 8 fraksi. Apakah kita sepakat dengan kuorum fraksi? Oke ya. Kuorum fraksi telah kita sepakati dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, rapat ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.37 WIB)
(KETUK PALU: 1X)
(RAPAT DINYATKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Bapak, Ibu sekalian.

Komisi I telah menerima surat dari Dirut LPP RRI. Yang pertama, kita terima surat tanggal 12 Januari 2022, perihal mohon diundang RDP ini kami abaikan karena mestinya tidak mungkin permohonan minta diundang RDP sementara keperluannya juga tidak dicantumkan. Jadi mohon maaf kami abaikan, sehingga disusul dengan surat yang berikutnya 20 Januari 2022.

Saya bacakan, kepada yang terhormat Pimpinan Komisi I DPR RI di Jakarta. Menindaklanjuti surat dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-8/AG.5/2022, tanggal 19 Januari 2022 tentang permohonan buka blokir DIPA Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon arahan Pimpinan Komisi I DPR RI agar LPP RRI mendapatkan dokumen persetujuan buka blokir DIPA LPP RRI Tahun Anggaran 2022.

Ini surat dari Direktur Utama LPP RRI Dr. I Hendrasmo, M.A. ditandatangani. Tembusannya kepada Dirjen Anggaran, Ketua Dewas, para Direktorat LPP RRI, dan Kepala Satuan Pengawas Internal.

Bapak, Ibu sekalian.

Surat tersebut dilampiri dengan surat dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-8/AG.5/2022, tanggal 19 Januari 2022, perihal permohonan buka blokir DIPA LPP RRI Tahun Anggaran 2022. Ini ada surat, saya bacakan atau karena ini, oke ya saya bacakan.

Nomor S-8/AG.5/2022 sifat segera, lampiran 1 (satu) berkas, hal permohonan buka blokir DIPA Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022. Yang terhormat Direktur Utama LPP RRI, Jakarta. Sehubungan dengan surat Direktur Utama LPP RRI Nomor 114/DU/01/2022, tanggal 14 Januari 2022, hal permohonan buka blokir LPP RRI Tahun Anggaran 2022. Dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan DIPA Nomor SPDIPA-116.01-0/2022, tanggal 17 Desember 2021 dialokasikan anggaran LPP RRI Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.041.898.104.000,- Dalam DIPA dimaksud terdapat catatan halaman 4.a (blokir) pada belanja non operasional, yaitu masih memerlukan persetujuan DPR sebesar Rp220.968.493.000,-;

2. Berkenaan dengan hal tersebut maka penyelesaian usul permohonan buka blokir pada DIPA LPP RRI Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp220.968.493.000,- memerlukan dokumen pendukung berupa persetujuan komisi terkait di DPR;
3. Mengingat usulan tersebut belum dilengkapi dengan dokumen persetujuan dari komisi terkait di DPR, kiranya LPP RRI dapat mengajukan kembali usul revisi pembukaan blokir setelah mendapat persetujuan dari komisi terkait di DPR;
4. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Atas nama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dwi Pudjiastuti, ditandatangani secara digital.

Baik Bapak, Ibu sekalian.

Jadi ini ada permasalahan di RRI blokir oleh Kementerian Keuangan bukan oleh Komisi I ya, sekali lagi Komisi I tidak memblokir anggaran RRI. Komisi I tidak membahas waktu itu karena berkaitan dengan Dirut yang bukan definitif, sehingga kita sepakat tidak berani membahas. Pak TBH begitu ya waktu itu ya.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):

Saya mohon izin Pimpinan.

Kalau sepakat, kalau sepakat ini, sebelum kita mulai mungkin kita ketok dulu untuk pencabutan kalau di TNI bintang ya, begitu. Sehingga pembahasan nanti ke depan kita asumsikan bintang itu sudah tidak ada. Nah, setelah itu nanti dimasukkan dalam kesimpulan untuk nanti bisa dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku. Nah, ini mungkin juga minta teman-teman.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Kalau membaca dari DJA justru rapat ini untuk membuat kesimpulan, bahwa apakah kita sepakat untuk merekomendasikan pembukaan blokir. Jadi kita rapat dulu, disampaikan tentang 220 yang diblokir Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini. Apakah kita setuju untuk RRI mengusulkan kembali agar dibuka blokir oleh Kementerian Keuangan.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):

Kalau gitu lebih cepat.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oke ya.

Baik Bapak, Ibu sekalian.

Perlu kami sampaikan juga bahwa untuk rapat pada hari ini kita laksanakan setelah Pimpinan Komisi I DPR RI berkonsultasi dengan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI terkait DIPA LPP RRI Tahun Anggaran 2022. Jadi perlu disampaikan bahwa kami mengadakan rapat itu setelah konsultasi dengan Pimpinan Badan Anggaran. Jadi tidak sembarangan kita adakan rapat, sudah atas permohonan dari RRI dilampiri dengan rekomendasi Kementerian Keuangan, dan kami konsultasikan langsung kepada Pimpinan Badan Anggaran, dan kemarin disarankan untuk mengadakan rapat. Dan atas saran kemarin kami langsung panggil RRI beserta seluruh jajarannya.

Baik, sebelum saya sampaikan tentunya ini ada susunan RRI yang baru, yang saya juga kaget karena selama Pansel kami tidak dikasih tahu sama sekali. Pansel dibentuk tidak ada pemberitahuan, kita tahu sudah susunan baru. Padahal biasanya Pansel, Menteri Kominfo saja bikin Pansel lapor ke kita. Ini ya saya kira apa namanya mungkin nanti ke depan yang begini-begini jangan sampai terulang kembali. Ada etika politik antara kita sebagai bermitra. Jangan sampai kemudian Bapak-bapak jalan sendiri tanpa komunikasi sama sekali, sementara tiba-tiba sudah terbentuk direksi yang kami tidak mendengar, kami tidak tahu apa-apa. Terus terang karena tidak ada surat kepada kami proses pembentukan Pansel, proses seleksi, dan seterusnya kami tidak diberitahu secara tertulis sama sekali. Saya kira ini untuk menjaga etika kemitraan antara RRI dengan Komisi I.

Bapak, Ibu sekalian.

Kepada Saudara Dirut LPP RRI kami persilakan untuk mempresentasikan maksud dari RRI untuk berkaitan dengan anggaran ini. Silakan.

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (I. HENDRASMO) :

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Sidang Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Yang saya hormati Anggota Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia, jajaran Direksi Radio Republik Indonesia periode 2021-2026.

Serta hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami paparkan DIPA LPP Radio Republik Indonesia periode tahun anggaran 2022, pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I yang pada hari ini memberikan kesempatan kepada kami, Tim Dewas dan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat di ruangan ini.

Yang kedua, kami turut berbelasungkawa atas meninggalnya putri Ibu Nurul Arifin Anggota Komisi I dari Fraksi Golkar. Dan berikutnya izinkan kami memperkenalkan dewas dan juga jajaran direksi. Yang pertama Anggota Dewas Bapak Mohamad Kusnaeni, kemudian ada Bapak Enderiman Butar-Butar, Bapak M. Rohanudin, demikian juga Ibu Rini Purwandari. Kemudian saya perkenalkan Direktur Keuangan kami Bapak Muhammad Fauzan, Direktur

Program dan Produksi Bapak Mistam, kemudian Direktur TMB Bapak Muhamad Sujai, dan Bapak Yonas Direktur LPU. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan, dan Direktur SDM Bapak Dedi Suparman, mohon maaf.

Selanjutnya kami akan melaporkan DIPA LPP RRI tahun 2022, yakni sebagai berikut. Perbandingan pagu anggaran dengan pagu alokasi tahun anggaran 2022 sesungguhnya tidak ada perubahan di angka 1,041 triliun dari pagu anggaran sama dengan yang didapat di pagu alokasi. Kemudian dari pagu alokasi senilai 1,041 triliun tersebut di-break down menjadi belanja pegawai sebanyak 55,7% atau senilai dengan 580,4 miliar, porsi paling besar. Kemudian 35,8% di belanja barang atau senilai 372,6 miliar. Kemudian porsi terkecil adalah belanja modal sebanyak 8,5% atau setara 88,7 miliar.

Selanjutnya pagu alokasi per program. Terdapat dua program, yakni program untuk pengelolaan dan penyelenggaraan siaran radio publik dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknik lainnya. Dari total pagu 1,041 triliun 87,5%-nya adalah program dukungan manajemen atau senilai 911,6 miliar, sementara 12,5%-nya atau senilai 130,2 miliar untuk program penyiaran publik, program pengelolaan dan penyelenggaraan siaran radio publik.

Kemudian belanja barang, dari nilai 372,6 miliar yang dialokasikan untuk belanja barang, 64,5%-nya atau setara 240,4 adalah belanja barang operasional. Kemudian 35,5%-nya atau senilai 132,1 adalah belanja barang non operasional.

Kemudian belanja modal, belanja modal dari total 88,7 miliar, 69,4%-nya adalah belanja infrastruktur model perkantoran. Sedangkan sisanya 30,6%-nya atau senilai 27,1 miliar diperuntukkan untuk belanja modal infrastruktur teknik.

Selanjutnya rekapitulasi pagu alokasi tahun anggaran 2022 per program dan per kegiatan. Terdapat dua program, yakni 01 untuk dukungan manajemen dan kedua adalah program penyiaran publik. Terbesar adalah diperuntukkan untuk pengelolaan keuangan LPP RRI di angka 828,9 miliar. Kemudian diperuntukkan untuk pengelolaan organisasi dan SDM, BMN dan umum, peringkat dua dengan nilai 69,8 miliar. Dan yang besar lain adalah untuk penyelenggaraan dan pengembangan stasiun siaran lokal atau regional diangka 5,5 miliar.

Kemudian untuk pengembangan infrastruktur penyiaran teknologi dan media baru senilai 42,4 miliar. Pengembangan program dan produksi siaran radio publik senilai 15,5 miliar. Untuk penyelenggaraan layanan dan pengembangan usaha senilai 14,9 miliar. Dan untuk pengelolaan keuangan dan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan di angka 8,7 miliar. Kemudian untuk penyelenggaraan pengelolaan siaran pemberitaan radio dan multimedia diangka 5,5 miliar. Serta untuk pengelolaan keuangan dan resiko pengendalian dan pengawasan internal dialokasikan 4,2 miliar. Dan selanjutnya untuk penyelenggaraan dan pengembangan stasiun siaran internasional, memiliki *floating* yang lebih sedikit diangka 3,8 miliar.

Bapak, Ibu untuk program prioritas nasional terdiri dari prioritas nasional konten siaran dalam 9 bahasa asing dengan rencana alokasi anggaran sebesar 1,5 miliar. Kemudian prioritas nasional konten siaran tanggap bencana kantong dengan rencana alokasi anggaran sebesar 5,8 miliar. Kemudian prioritas nasional konten siaran dokumenter dengan rencana alokasi anggaran sebesar 5,5 miliar. Sedangkan program prioritas nasional sarana teknik pengadaan pemancar 3T untuk LPP RRI Tahun Anggaran 2022, yaitu adalah infrastruktur sarana teknik LPP RRI dengan nilai 15,6 miliar yang direncanakan untuk diadakan untuk di wilayah Kepulauan Bintan, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Lahat, Pulau Taliabu di Maluku Utara, Humbang Hasundutan di Sumatera Utara, Sijunjung di Sumatera Barat, Kolaka Utara Sulawesi Tenggara, Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur, Toraja Utara Sulawesi Selatan, Talaud Sulawesi Utara, dan Baubau Sulawesi Tenggara. Jadi ada 12 daerah di mana akan dilakukan pengadaan pemancar.

Kemudian program prioritas nasional LPP RRI Tahun 2022 mengacu pada arah penajaman kebijakan kementerian/lembaga, yaitu sebesar 28,4 miliar. Dalam hal ini terkait dengan arah kebijakan prioritas nasional ketiga, yaitu SDM berkualitas dan berdaya saing, yaitu

program produksi internasional 9 bahasa asing senilai 1,5 miliar. Dan program produksi dokumenter salah satunya adalah program dukungan terhadap G20 sebesar 5,5 miliar.

Kemudian terkait dengan arah kebijakan prioritas nasional kelima, yaitu infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar. Yang pertama adalah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur TIK, pengadaan infrastruktur pemancar di 3T sebesar 15,6 miliar. Kemudian dukungan konten siaran publik yang mendorong percepatan adopsi digital pada sektor strategis sebesar 52 miliar, dalam hal ini kerja sama dengan PT. Telkom. Dan pembangunan PLTSA tahun 2022 di gedung kantor pusat LPP RRI sebesar 1 miliar.

Kemudian arah kebijakan terkait prioritas nasional keenam, lingkungan hidup, ketahanan bencana, perubahan iklim, yaitu program kentongan, yaitu peningkatan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, penguatan literasi dan edukasi kepada masyarakat senilai 5,8 miliar.

Bapak, Ibu terkait dengan rincian konten pengembangan siaran itu diperuntukkan untuk di antaranya adalah peningkatan berita PRO2, PRO4, untuk pembiayaan liputan, gelaran motor GP, program belanja di RRI dan guru keliling, pengiriman perwakilan RRI di luar negeri untuk big data, *sprint*, jurnalisme presisi, program bangga berwisata di Indonesia, itu di antara sasaran pengembangan siaran.

Kemudian isu aktual, saat ini sedang dilakukan pembangunan gedung penunjang siaran dan studio siaran luar negeri, 15 lantai di Jalan Medan Merdeka Barat. Di mana rencana pembangunan gedung penunjang siaran dan studio SLN tahun 2021 dengan biaya sebesar 93,9 miliar. Kemudian pembangunan tahun 2022 sebesar 60,6 miliar sehingga total biaya pembangunan gedung tersebut sebesar 154,5 miliar.

Selanjutnya kebijakan pencadangan anggaran atau *automatic adjustment* LPP RRI tahun anggaran 2022. Berdasarkan surat dari Menteri Keuangan Nomor S1088/MK.02/2021, pagu semula sebesar 1,041 triliun menjadi sebesar 990,4 miliar. Dan rincian pencadangan anggaran atau *automatic adjustment* per program penyiaran publik yang semula pagu rupiah murni adalah 118,7 miliar untuk pencadangan anggarannya adalah sebesar 17,6 miliar. Kemudian untuk dukungan manajemen yang tadinya 909,6 miliar, pencadangan anggarannya adalah 33,7 miliar sehingga total untuk pencadangan anggaran adalah 51,4 miliar.

Demikian Bapak, Ibu sudah kami laporkan DIPA LPP RRI Tahun Anggaran 2022. Atas perhatian dan kesempatannya kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Dan selanjutnya kami mohon arahan dari Pimpinan dan Anggota Komisi I terkait dengan DIPA anggaran RRI tahun 2022 agar kami bisa kami pergunakan anggaran itu. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Sebentar Pak, sebelum kita lanjutkan ini tadi Bapak sampaikan bahwa pagu anggaran dan pagu alokasi tidak ada perubahan ya? Tidak ada perubahan. Pak, saya mau tanya ini yang Bapak sampaikan di halaman 7 ya, biar nanti kita pendalamannya lebih terarah. Yang halaman 7 itu sudah seperti persis pagu anggaran waktu itu disampaikan ke Komisi I belum urutannya, ininya, isinya?

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (I. HENDRASMO) :

Sudah Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Bisa ditampilkan nggak? Inikan mestinya meneruskan ya usulan waktu itu yang sudah menjadi pagu anggaran RRI tahun 2022. Apakah angkanya ini meng-copy dari sana atau bagaimana?

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (I. HENDRASMO) :

Copy Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Copy persis ya?

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (I. HENDRASMO) :

Iya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oke ya, tidak ada perubahan ya?

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (I. HENDRASMO) :

Iya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oke, clear. Terus kemudian dari surat Banggar tadi, ini biar nanti menjadi perhatian semuanya. Dari surat Banggar tadi, itu berarti ada 220 miliar 968 yang dibintang, blokir. Kenapa? Tadi saya nggak mendengar, saya nggak melihat paparan Bapak ini loh yang diblokir yang minta dibuka. Bapak kan minta persetujuan kami untuk membuka, yang mana ini? Belum ada soalnya. Sebelum diskusi ya, ini kita lengkapi dulu ya, karena kita mau menyetujui yang diblokir kan 220, yang lain kan nggak? Berarti kan kita akan menyetujui pembukaan blokir oleh Kementerian Keuangan yang 220, yang lainnya kan nggak ada, nggak perlu, yang mana ini yang 220? Ya kan harus jelas.

DIREKTUR KEUANGAN LPP RRI (MUHAMMAD FAUZAN):

Izin menyampaikan Pimpinan. Memang di DIPA LPP RRI tidak semuanya diblokir, terutama di belanja pegawai itu yang 530 dan lagi di 52 untuk perkantoran Pak, misalkan perkantoran termasuk perjalanan dinas.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Pak, tolong dengarkan dulu baik-baik ya.

DIREKTUR KEUANGAN LPP RRI (MUHAMMAD FAUZAN):

Siap Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Dari 1 koma sekian itukan yang diblokir 220 sekian, ya kan? Kita tahu bahwa selisih itu, itu tidak diblokir, kita nggak akan bahas itulah karena tidak ada pemblokiran. Sementara Bapak mengusulkan kepada kami agar memberikan persetujuan untuk dilepas blokirnya, apa bintangnya oleh Kementerian Keuangan. Mana yang 220 ini kok nggak ditampilkan.

DIREKTUR KEUANGAN LPP RRI (MUHAMMAD FAUZAN):

Izin menambahkan Pak, yang 220 ini memang di dalam persentasi tidak tersampaikan Pak Pimpinan. Cuma yang dari 222 ini, itu adalah di belanja barang non operasional Pak. Di sini non operasionalnya ada 132 miliar 197.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Sebentar saya potong, mestinya kan ditampilkan di sini kami baca itu. Kami kan nggak tahu presentasi tadi nggak ada, benar ya teman-teman ya, nggak kelihatan. Kita tahu bahwa tidak semua diblokir, kita hari ini mau membahas yang 220, jika ditampilkan kira-kira ya oke lah, gitu selesai tapi tidak ada terus bagaimana kami menyetujui yang anda tidak presentasikan?

DIREKTUR KEUANGAN LPP RRI (MUHAMMAD FAUZAN):

Izin Pimpinan, memang di dalam pagu alokasi ini memang ini hanya dibintanginya itu di non operasional dan belanja modal saja Pak, sebesar 22 itu Pak, 222 miliar sekian.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Kan sebenarnya mudah sekali tampilkan saja di situ. Mana yang mana?

DIREKTUR KEUANGAN LPP RRI (MUHAMMAD FAUZAN):

Yang rekapan dua alokasi tadi Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Waduh.

DIREKTUR KEUANGAN LPP RRI (MUHAMMAD FAUZAN):

Halaman 7.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Masa kita suruh ngerekap.

DIREKTUR KEUANGAN LPP RRI (MUHAMMAD FAUZAN):

Izin Pimpinan, ini yang belanja barang non operasionalnya sebesar 132 dan belanja modal sebesar 88, totalnya 222 Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Sampaikan kepada kami “ini loh 222 sebagaimana surat rekomendasi dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran”, gitu loh Pak. Jadi kita sama-sama enak gitu.

DIREKTUR KEUANGAN LPP RRI (MUHAMMAD FAUZAN):

Siap, salah Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Gini, karena ini merupakan dokumen pembahasan anggaran tolong diperbaiki dulu. Kita kasih waktu 5 menit diperbaiki jumlahnya, ada angka 220-nya itu loh Pak, totalnya itu loh. Dikasih, ditambahi, kemudian di-*print* kepada kita semuanya, sehingga kita itu menyetujui punya barang bukti bahwa memang diusulkan 220 itu untuk dibuka. Kita kasih waktu 5 menit ya.

Oke, silakan diperbaiki terus kemudian dibagikan kepada seluruh anggota. Ini bahas anggaran Pak, nggak bisa cuma asal “maksud saya ini, terus ya sudah saya juga sepakat maksud anda ini”, harus ada dokumennya, gitu loh ya. Kita kasih waktu 5 menit kita skors.

(RAPAT: DISKORS)

Ok sudah belum? Sudah terima semua? Sudah ya. Sudah Bapak, Ibu? Oke, skors kita cabut.

(SKORS: DICABUT)

Bapak, Ibu sekalian.

Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Utama LPP RRI bahwa dalam surat kepada Komisi I, bahwa mengajukan permohonan untuk persetujuan. Saya baca saja ya, penyelesaian usul permohonan buka blokir pada DIPA LPP RRI. Saya ulangi, berkenaan dengan hal tersebut maka penyelesaian usul permohonan buka blokir pada DIPA LPP RRI Tahun Anggaran 2022 sebesar 220.968.493.000,- memerlukan dokumen pendukung berupa persetujuan Komisi I terkait di Dewan Perwakilan Rakyat.

Ini, tampilan ini adalah tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari presentasi Saudara Direktur Utama LPP RRI, oke ya. Bapak, Ibu sekalian, sebagaimana bahan terlampir yang sudah diedarkan kepada Bapak, Ibu sekalian.

Saya langsung ambil keputusan saja karena nggak perlu diskusi ya, atau ada yang mau diskusi? Kalau sudah diputus ya nggak usah diskusi terus bulat. Oke ya, ada yang mau dipertanyakan tentang ini? nggak kan, oke.

Bapak, Ibu sekalian.

Apakah usul permohonan buka blokir pada DIPA LPP RRI Tahun Anggaran 2022 sebesar 220.968.493.000,- yang terdiri dari belanja barang LPP RRI Tahun Anggaran 2022 sebesar 132.197.656.000,- yang terdiri dari belanja barang non operasional sebesar itu tadi 132.197.656.000,-.

Dan belanja modal LPP RRI Tahun Anggaran 2022 sebesar 88.770.837.000,- yang terdiri dari belanja modal infrastruktur teknik 27.119.537.000,- dan belanja modal infrastuktur perkantoran sebesar 61.651.300.000,- dapat disetujui? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak, Ibu sekalian.

Dengan demikian rapat sudah selesai, karena agendanya hanya melakukan persetujuan itu. Silakan ditampilkan kesimpulan rapat. Mau diskusi apa sih?

Oke, kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dewas dan Dewan Direksi LPP RRI, Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Rabu, 26 Januari 2022.

"Komisi I DPR RI menyetujui penyelesaian usul permohonan buka blokir pada DIPA LPP RRI Tahun Anggaran 2022, catatan halaman 4a (blokir) terkait belanja non operasional sebesar 220.968.493.000,- dengan rincian belanja barang non operasional sebesar 132.197.656.000,- dan belanja modal sebesar 88.770.837.000,-"

Demikian ada catatan dari RRI?

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):

Tambahan barangkali Pimpinan. Akan segera dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku ya atau gimana itu Pak?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Mereka yang bawa, kita hanya persetujuan. Demikian ya.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Iya.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Itu halamannya 4a atau ini halaman 5 ini, bukan?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Bukan, bukan itu. Ini kaitannya dengan rekomendasi dari Kementerian Keuangan.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Oh itu, karena ada rincian di bawah saya lihat. Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ini catatan halaman 4a blokir ini berkaitan dengan sesuai dengan surat Kementerian Keuangan ya. Oke ya, cukup ya.

Baik Bapak, Ibu sekalian dengan demikian rapat sudah selesai dan sebelum kita tutup kita beri kesempatan kepada Dirut LPP RRI untuk menyampaikan *closing statement*. Silakan.

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (I. HENDRASMO) :

Baik, terima kasih Pimpinan Sidang.

Bapak, Ibu terutama Pimpinan Sidang Komisi I DPR RI dan Anggota Komisi I DPR RI.

Kami terus terang mengucapkan banyak terima kasih atas persetujuannya yang baru sore hari ini kita dapatkan. Dan kami mohon doanya segera kita bisa melakukan kerja-kerja, kegiatan-kegiatan operasional yang semestinya harus kita lakukan untuk pelayanan publik kami.

Saya kira demikian. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih kepada Bapak Direktur Utama LLP RRI beserta seluruh jajarannya, Dewas yang hadir pada hari ini atas perhatiannya, sehingga rapat ini bisa berjalan dengan lancar. Dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbil'alamin*, rapat ini saya nyatakan ditutup.

Wabillahi Taufiq Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.40 WIB)

(KETUK RAPAT: 3X)

Jakarta, 26 Januari 2022

**a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,**

**SARTOMO, S.S., M.Si.
NIP. 196808111996031001**